

## Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda

Abdul Wahid

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia

Email: [abdulwahid@uinjkt.ac.id](mailto:abdulwahid@uinjkt.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Penelitian ini perlu dilakukan karena eksistensi pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses sejarah yang mengalami pasang surut. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa, yang tidak lepas dari era kolonialisme. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan pustaka setelah secara sungguh-sungguh mempelajari berbagai literatur yang relevan terkait kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Kajian ini menemukan bahwa hegemoni pendidikan Belanda dalam mengatur kebijakan pendidikan Islam, khususnya yang diusung oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, didasarkan pada nalar politik, ideologis, dan kultural ala kolonialis untuk memaksakan pengaruh pemerintahannya terhadap masyarakat pribumi Indonesia. Sehingga memunculkan analisa terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada masa penjajahannya di Indonesia, ternyata banyak merugikan umat Islam. Kesimpulannya, temuan tersebut membuat pendidikan Islam kurang fleksibel dan sulit untuk dikembangkan. Meski demikian, upaya memperjuangkan dan mempertahankan pendidikan Islam terus diwujudkan dengan mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Kolonial Belanda, Pendidikan Islam

### Abstract

*The purpose of this study was to analyze the existence and policies of Islamic education during the Dutch colonial period. This research is necessary because the existence of Islamic education in Indonesia cannot be separated from the historical process that has gone through ups and downs. The history of education in Indonesia has undergone extraordinary changes, which cannot be separated from the era of colonialism. A qualitative method with a descriptive approach was used to analyze the data. Research data sources were obtained from library materials after seriously studying various relevant literature related to Islamic education policies in the Dutch colonial era. This study found that the hegemony of Dutch education in regulating Islamic education policies, especially those promoted by Islamic educational institutions in Indonesia, was based on colonialist-style political, ideological and cultural reasoning to impose influence over its governance on indigenous Indonesians. So that it gives rise to an analysis of the policies issued by the Dutch government during their colonization of Indonesia, it turns out that many are detrimental to Muslims. The conclusion is that these findings make Islamic education less flexible and difficult to develop. Nevertheless, efforts to fight for and maintain Islamic education continue to realize by establishing several Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools and madrasas.*

**Keywords:** Education Policy, Dutch Colonial, Islamic Education



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan siswa melalui jalur formal, informal, dan nonformal (Idris et al., 2021; (Hanifah, Sujannah, Rohmawati, & Maisyanah, 2020; Souto-Otero, 2021). Pendidikan

merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah, rumah tangga, dan masyarakat (Darling-Hammond, Flook, Cook-Harvey, Barron, & Osher, 2020; Koskela, Pihlainen, Piispa-Hakala, Vornanen, & Hämäläinen, 2020). Hakikat pendidikan adalah suatu proses mewariskan nilai-nilai kepada manusia untuk menjalani kehidupan (Idris & Mokodenseho, 2021; Kopnina, 2020). Tanpa pendidikan, manusia sulit untuk berkembang terutama dari segi pengetahuan akan jauh tertinggal. Begitu juga dengan suatu negara, tanpa pondasi pendidikan yang kuat dan tinggi, tidak akan mengalami kemajuan. Dengan kata lain, maju dan berkembangnya sebuah negara sangat bergantung atau ditentukan oleh kualitas pendidikan itu sendiri. (Hernandez, 2020; Agasisti & Berbegal-Mirabent, 2021; Benito, Gil, & Romera, 2020).

Perkembangan pendidikan suatu bangsa sangat terkait dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa, baik kebijakan dalam bidang politik maupun agama (Milligan, 2020). Bahkan, kebijakan politik akan berdampak besar terhadap dunia pendidikan (Mokodenseho, 2020). Berkembangnya pendidikan Islam di Nusantara tercatat seiring dengan masuknya Islam ke wilayah ini (Munadi & Hakiman, 2021). Pendidikan Islam yang berkembang di Nusantara telah mengalami banyak perubahan besar. Hal ini terlihat pada bentuk lembaga pendidikan yang semula sederhana dengan sistem tradisional (Rahman, 2021; Sabirin, Yusuf, Abdullah, Mujiburrahman, & Prasojo, 2022) berkembang menjadi lembaga pendidikan yang semi modern seperti lembaga pendidikan berbasis madrasah (Silfiana, 2020; Kosasih, Rizal, & Asyafah, 2020).

Pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam telah melewati sejarah yang begitu panjang dan rumit. Meskipun mengalami kemajuan, namun dapat dikatakan cukup rumit, utamanya berkaitan dengan perkembangan kebijakan pendidikan Islam (Bashori, Prasetyo, & Susanto, 2020). Berbagai upaya pembaharuan kurikulum diupayakan untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang ada sekaligus untuk meningkatkan pembangunan daerah maupun pembangunan Nasional (Latief, Sari, Yusuf, Armila, & Hidayat, 2021). Eksistensi kurikulum pendidikan Islam Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Setiap periode, kurikulum selalu berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Semakin besar pengaruh zaman, maka semakin besar pula tugas lembaga pendidikan. Dilihat dari sejarah, perkembangan pendidikan Islam telah dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia yang diperkirakan pada abad ke-12 M. Azra (2019) mencatat bahwa pada dasarnya modernisasi kurikulum pendidikan di Indonesia sebagaimana yang ada saat ini bersumber dari Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-19.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda bagi penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan pada kepentingan Belanda, serta dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat memperkuat kedudukan penjajah. Dalam konteks itu, tujuan pendidikan pun diarahkan untuk kepentingan kolonial. Bahkan, isi pendidikan itu pun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah. Demikian pula dengan pendidikan Islam, sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak kolonial Belanda (Mokodenseho & Zamhari, 2021).

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari umat Islam, termasuk dalam perjuangan mengusir penjajah. Umat Islam sebagai umat yang mayoritas di Indonesia tentunya mempunyai tanggungjawab moral untuk menata dan membangun negeri ini. Dalam bidang pendidikan, para tokoh Islam menetapkan fondasi pendidikan Islam yang di masa kolonial tidak terakomodir oleh pemerintah penjajah. Pendidikan Islam tidak dimasukkan sebagai mata pelajaran terutama sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah penjajah. Karena itu, tokoh-tokoh Islam mendirikan sekolah dan menampung orang-orang Islam untuk

diberikan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim (Guhin, 2020). Dasar terpenting dari pendidikan Islam adalah al-Qur'an, hadis, dan ijtihad (Dhaifi, Zakariya, & Salehudin, 2022). Menetapkan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya karena kebenaran dari perspektif keimanan semata, melainkan juga kebenaran keduanya telah dapat dibuktikan oleh akal berdasarkan sejarah dan pengalaman manusia.

Pendidikan agama Islam sebagaimana dijelaskan Mahmud (2000) adalah mengajar dan melatih manusia, serta mendorong dan membiasakannya untuk berpegang teguh pada sistem kehidupan yang datang dari Allah SWT. melalui bahasa para Rasul-Nya baik yang diturunkan kepada mereka tercatat dalam al-Kitab, maupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. dari Tuhan-Nya tanpa disertai al-Kitab. Berdasarkan dari tiga jenis lembaga pendidikan yang kini berkembang di Indonesia yaitu pesantren-sekolah-madrasah, hanya pesantren yang berakar dari tradisi asli (*indigenous*) Nusantara. Sekolah dan madrasah yang muncul belakangan, lahir dari hasil interaksi dengan pihak luar. Sekolah dikenal setelah adanya "interaksi" bangsa Indonesia dengan kaum penjajah, sedangkan madrasah lahir sebagai respon umat Islam di Indonesia atas gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah sekaligus sebagai *counter institution* terhadap lembaga sekolah bentukan penjajah pada masa kolonial Belanda (Azra, 2019).

Dalam kacamata kolonialisme Belanda, secara *de facto* lembaga pendidikan Islam menjadi *training center* dan *cultural center* yang lahir dan dilembagakan oleh masyarakat Islam yang konsisten melawan kolonialisme berbasis pendidikan Islam, serta membumikan pendidikan yang berlandaskan adagium memanusikan manusia (Untung, 2013). Hal tersebut menurut Ziemek (1986) tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan secara masif oleh pesantren yang dimotori oleh para kyai sebagai aktor intelektualnya. Sementara Arif (2018) menyebut dua cara yang di tempuh pesantren dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pertama, secara tersembunyi, dilakukan dengan cara bersikap konservatif, defensif, dan isolasionisme. Kedua, perlawanan terbuka, dilakukan dengan cara bersikap non-kooperatif dan anti-kolonialisme. Arif (2018) menambahkan bahwa perlawanan tersebut adalah "jihad" dalam menjaga identitas religio-kultural bangsa dari dominasi penetrasi sistem pendidikan sekuler dan invasi militer Belanda. Dengan demikian, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari proses sejarah yang mengalami pasang surut. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa, yang tidak lepas dari era kolonialisme Belanda. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu maupun kelompok, atau mempelajari suatu peristiwa. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka setelah mempelajari sejumlah literatur relevan terkait eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Data penelitian yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini disusun dengan mengikuti langkah-langkah penelitian Miles &

Huberman (1996), yang dimulai dengan pengumpulan, reduksi dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Pendidikan Islam Pra dan Pasca Kolonialisme

Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia (Mushlihin, Narulita, & Aulia, 2021). Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakan pengajaran Islam walaupun dengan cara yang sangat sederhana (Nurbaiti, Suparta, & Azwar, 2020). Kebutuhan umat Muslim dengan pendidikan mendorong umat Islam Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu-Budha menjadi pesantren (Sabarudin, 2015). Umat Islam Minangkabau mengambil alih *surau* yang merupakan peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam (Alfurqan, 2020). Sementara di Aceh, *meunasah* ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam (Ramayulis, 2012).

Kondisi pendidikan Islam pada zaman Belanda sangat memprihatinkan. Umat Islam terus-menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak menggembirakan. Namun, umat Islam pantang menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya pendidikan Islam bangkit dan mengalami kemajuan (Nata, 2011). Penaklukan bangsa Barat atas Dunia Timur dimulai dengan jalan perdagangan. Demikian juga tujuan Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang berharga mahal di Eropa. Selain ingin mencari kekayaan dan kejayaan, juga menyebarkan ajaran agama yang mereka anut (Mokodenseho & Zamhari, 2021).

Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman (w. 1599), dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang kembali ke Indonesia dipimpin oleh Jacob C. van Neck (w. 1638) pada tahun 1598. Kedatangan bangsa Belanda memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil jajahan, bukan untuk kemakmuran bangsa yang dijajah. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru tetapi sekedar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah dibandingkan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut dengan pembaharuan pendidikan adalah Westernisasi dan Kristenisasi yakni kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif tersebut, yang mewarnai kebijakan Belanda selama menjajah Indonesia (Muslihah, 2010).

Sebenarnya kedatangan Belanda ke Indonesia pada mulanya bermotifkan dagang, namun belakangan ditumpangi oleh misi-misi lain. Setelah berkuasa, kebijakan yang mereka buat sangat menekan umat Islam terutama kepada para ulama dan pesantren yang dibinanya. Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, kepentingan Belanda selalu mendapat rintangan dari ulama. Di bidang perdagangan, Belanda melihat peranan ulama dalam masyarakat memiliki dwi fungsi sebagai dai dan pedagang terutama pasca perang salib, pihak Belanda masih menganggap para ulama dan umat Islam adalah ancaman (Suryanegara, 1999). Kedua, ikatan yang cukup kuat antara rakyat dengan ulama, karena mereka dipandang sebagai kelompok intelektual Islam, dan pengaruhnya semakin dalam bila berhasil membina pesantren (Baudet & Brugmans, 1987). Ketiga, fakta yang tidak bisa dipungkiri sebagaimana yang diakui oleh mantan Gubernur Hindia-Belanda, Thomas Stamford Raffles (w. 1826) bahwa ulama-ulama selalu tidak berubah dan dijumpai

dalam setiap pemberontakan (Shiddiqi, 1996). Secara politik, peran pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum pribumi terutama pasca diterapkannya kebijakan Politik Etis (*Ethische Politiek*) tidak hanya memecah belah umat Islam (Mokodenseho, 2020), tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern (Huda, 2007).

Penjajahan kolonial Belanda di Indonesia memberikan pengaruh besar pada pendidikan Islam di Indonesia. Imperiumisasi dan misionarisme adalah dua tujuan terbesar kolonial Belanda saat singgah di Indonesia. Dalam mengembangkan misi misionarisme, kolonial Belanda enggan memberikan ampun pada penduduk pribumi yang belajar agama baik di lembaga *surau* maupun di pesantren. Kolonial Belanda bahkan sering membunuh penduduk pribumi yang beragama Islam termasuk mereka yang sedang belajar agama. Misi besar yang dilakukan kolonial Belanda dilakukan secara ketat, bahkan tidak segan mengeluarkan regulasi pembelajaran agama terutama pendidikan Islam bagi rakyat Indonesia (Raya, 2018).

Pada masa Pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (w. 1844) di Batavia tahun 1813-1882, misi Kristenisasi dilakukan dengan mewajibkan pendirian dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen pada sekolah-sekolah di setiap wilayah Keresidenan (Raya, 2018). Karena ketakutan pemerintah kolonial yang semakin menjadi-jadi terhadap pendidikan Islam di Indonesia, mereka mencetuskan lembaga khusus untuk bertindak sebagai pemantau penyelenggaraan pendidikan Islam dan kehidupan beragama di Indonesia yang disebut dengan *Priesterraden* (Zuhri, 2021). Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam disebut juga dengan bumiputera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang bumiputera Indonesia. Setidaknya ada beberapa macam pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu ke Islam; sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara, guru mendatangi para muridnya, yakni anak-anak bangsawan dan kalangan Keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaanya. Adapun murid-muridnya, tidak lagi terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan Keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata (Ramayulis, 2012).

Kedua, sistem pendidikan *surau/langgar*. Sistem pendidikan di *surau* tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuan mereka masing-masing, dan proses belajarnya tidak kaku, serta murid diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran, murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di *surau* memakai metode ceramah, membaca, dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan seorang Sheikh dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Sheikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimak dan mencatat beberapa hal-hal penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah *halaqoh* (Ramayulis, 2012).

Ketiga, sistem pendidikan pesantren. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode *sorogan*, yaitu layanan individual dalam belajar mengajar dimana Kyai hanya menghadapi seorang atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kyai, kemudian kyai membacakan beberapa bagian dari isi kitab, lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh mempelajari materi baru. Kemudian, metode *wetonan/bandongan*, atau layanan

kolektif ialah metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab, lalu para santri menyimak bacaan kyai sambil membuat catatan penjelasan di pinggir kitabnya (Aris & Syukron, 2020). Terakhir, metode musyawarah, yakni metode belajar dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan dari pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan. Dalam konteks itu, seorang Kyai hanya memberikan arahan seperlunya (Ramayulis, 2012).

## Pembahasan

### Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial Belanda

#### 1. Dikotomis

Dikotomis pendidikan yang dimaksud dalam konteks tulisan ini adalah pertentangan antara pendidikan Belanda (HIS; Hollandsch-Inlandsche School, MULO; Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, AMS; Algemene Middelbare School, dan sejenisnya) dengan pendidikan Islam (Pesantren, Dayah, Surau, dan sejenisnya) (Ritonga, 2017). Pertentangan ini dapat dilihat dari sudut ilmu yang dikembangkan. Di sekolah-sekolah Belanda, ilmu-ilmu umum (ilmu-ilmu sekuler) dikembangkan. Pemerintah Belanda tidak mengajarkan pendidikan agama sama sekali di sekolah-sekolah yang mereka asuh (Zuhairini, 2004; Mokodenseho & Zamhari, 2021).

Pemerintah Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, dalam ordonansi. Pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sementara di lembaga pendidikan Islam dalam hal ini pesantren, pendidikan yang diberikan adalah pendidikan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian, dikotomi dalam pendidikan itu amat jelas di masa penjajahan Belanda. Berkaitan dengan itu, kedua lembaga pendidikan (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda, yang sekaligus melahirkan *output* yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum menyebabkan munculnya sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, dan dilanjutkan serta diperkuat pada abad ke-20.

Apabila ditinjau, implikasi Politik Etis secara sepintas dapat dikatakan bahwa, Belanda telah melakukan pembaharuan di beberapa bidang, termasuk pendidikan. Namun Apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan itu adalah Westernisasi dan Kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijaksanaan penjajah Barat di Indonesia.

#### 2. Diskriminatif

Kebijakan diskriminatif yang ditempuh Belanda terhadap masyarakat pribumi memang dilakukan dengan amat ekstrim, yaitu dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah yang setaraf dengan sekolah untuk anak-anak Eropa. Hal ini berbeda dengan kebijakan penjajah lain seperti Spanyol yang telah mendirikan Universitas di Filipina pada permulaan abad ke-16 untuk masyarakat pribumi, demikian pula Inggris telah membuka universitas di India pada abad ke-17. Sementara Belanda baru mendirikan sekolah tinggi pada dekade ke-2 abad ke-20, itu pun terjadi atas tekanan keadaan darurat yang disebabkan oleh Perang Dunia I. Selain itu, Pemerintah Belanda juga menanamkan diskriminasi dalam pendidikan untuk anak-anak Belanda dengan pendidikan untuk anak pribumi (Sukmurdianto & Zulfa, 2020).

Pemerintah Belanda memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Diantara pelaksanaan diskriminatif adalah Pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Dualistik diskriminatif, yaitu membedakan bahasa pengantar pendidikan untuk orang-orang Belanda (berbahasa Belanda) dengan pendidikan untuk orang-orang pribumi (berbahasa Melayu). Sentralistik, yaitu pendidikan itu secara keseluruhan diatur dan ditentukan orang Belanda (Daulay, 2009).

Tujuan Pendidikan bagi pribumi, yaitu menghasilkan tamatan yang dapat menjadi warganegara Belanda kelas dua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta Belanda. Diberlakukan Ordonansi Guru pada tahun 1905. Ordonansi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama. Ordonansi ini dirasakan oleh para guru agama sangat berat, terlebih bagi guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah. Dampak negatif yang dihasilkan dari ordonansi ini adalah dapat digunakan untuk menekan Islam yang dikuatkan dengan alasan stabilitas keamanan (Daulay, 2009).

Perkembangan berikutnya adalah pada tahun 1905, kebijakan tersebut akhirnya dicabut, karena dianggap tidak relevan lagi, dan diganti dengan ordonansi tahun 1925, yang isinya hanya mewajibkan guru agama untuk memberitahu bukan meminta izin. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru bahwa orang yang memberi pengajian Islam harus terlebih dahulu izin kepada Pemerintah Belanda, dan peraturan lebih pada penekanan kepada pendidikan Islam bahwa tidak semua kyai dapat mengajar mengaji, kecuali sudah mendapat rekomendasi. Selanjutnya, pada tahun 1932 M keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberi pelajaran yang tidak disukai penjajah (Daulay, 2009).

Bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20, yaitu: (a) Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yang mengajarkan kitab-kitab klasik; (b) Lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah Islam. Di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, lembaga ini mengajarkan ilmu agama; (c) Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah dengan menampilkan sistem baru, yaitu ada unsur yang diambil dari pesantren dan ada pula unsur yang diambil dari sekolah (Rofi, 2016).

Keberadaan madrasah juga karena didorong oleh rasa tidak puas masyarakat Muslim melihat kondisi pendidikan saat itu. Adapun pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai, sedangkan bila mengikuti sekolah-sekolah ala Belanda dikhawatirkan akan memperluas watak sekularisme (Sirozi, 2004), sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana (Fadjar, 1998).

Berdirinya lembaga pendidikan yang berlandaskan Islam, di satu sisi merupakan upaya mengantisipasi perkembangan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan di sisi lain sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan gerakan politik bangsa Indonesia. Para tokoh pendidikan Islam menyadari betapa pentingnya pendidikan (agama) untuk membina generasi muda. Mereka khawatir pengaruh ulama dan pemikiran Islam akan lenyap dari generasi muda dengan berdirinya sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda yang secara resmi mengambil sikap netral terhadap agama (Uka Tjandrasmita, 2009).

Sehubungan dengan berbagai kebijakan tersebut Nasution (2001) menyatakan bahwa politik kolonial erat hubungannya dengan mereka pada umumnya, yaitu suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Menurut Nasution (2001) menyebut beberapa ciri politik dan praktek pendidikan pemerintah kolonial khususnya Belanda. Pertama, diskriminasi yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kedua, diskriminasi dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi. Ketiga, kontrol sosial yang kuat. Keempat, keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah dalam menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan. Kelima, prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di Negeri Belanda. Keenam, tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi.

## KESIMPULAN

Kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan cukup banyak mendapat tekanan dari pihak penjajah, namun dengan semangat jiwa patriotisme dan jihad di jalan Allah SWT yang dimiliki oleh para pejuang Islam mampu melawan penjajah dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam memiliki faktor pendukung di samping faktor penghambat. Keteguhan hati yang tertanam dalam semangat umat Islam akan kebenaran yang dijalankan sebagai pendukung perkembangan pendidikan Islam. Sementara kebijakan yang diterapkan penjajah merupakan faktor penghambat. Bagi Pemerintah Belanda, pendidikan tidak hanya bersifat pedagogis-kultural, tetapi juga bersifat pedagogis-politis. Eksistensi pesantren pada zaman kolonialisme Belanda, terkadang oleh kebijakan khusus penyelenggaraan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang memang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai instrumen yang ampuh untuk mengurangi dan akhirnya mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Namun, betapapun keras dan diskriminatif kebijakan saat itu, pada akhirnya memberikan inspirasi pada tokoh-tokoh Muslim untuk menggabungkan kedua sistem pendidikan yang ada dalam bentuk madrasah, sehingga generasi muda Muslim terhindar dari pengaruh Westernisasi dan sekularisasi yang disusupkan pihak kolonial Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agasisti, T., & Berbegal-Mirabent, J. (2021). Cross-country analysis of higher education institutions' efficiency: The role of strategic positioning. *Science and Public Policy*, 48(1), 66–79. doi: 10.1093/scipol/scaa058
- Alfurqan, A. (2020). Evolution and Modernization of Islamic Education In Minangkabau. *Afkaruna*, 16(1), 82–98. doi: 10.18196/AIJIS.2020.0114.82-98
- Arif, M. (2018). *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKIS.
- Aris, A., & Syukron, S. (2020). Perbandingan Metode Bandongan dan Sorogan dalam Memahami Kitab Safinatunnajah. *Tsaqafatuna*, 2(1), 1–10. doi: 10.54213/tsaqafatuna.v2i1.37
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bashori, B., Prasetyo, M. A. M., & Susanto, E. (2020). Change Management Transformation in Islamic Education of Indonesia. *Social Work and Education*, 7(1), 84–99. doi: 10.25128/2520-6230.20.1.7.
- Baudet, E. H. P., & Brugmans, I. J. (1987). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta:



Yayasan Obor Indonesia.

- Benito, M., Gil, P., & Romera, R. (2020). Evaluating the influence of country characteristics on the Higher Education System Rankings' progress. *Journal of Informetrics*, 14(3), 101051. doi: 10.1016/j.joi.2020.101051
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. doi: 10.1080/10888691.2018.1537791
- Daulay, H. P. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dhaifi, I., Zakariya, Z., & Salehudin, M. (2022). Islamic Education Optimized Towards the Essence of Education in Islamic Teachings. *Review of Islamic Studies*, 1(2), 137–145. doi: 10.35316/RIS.V1I2.428
- Fadjar, A. M. (1998). *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Guhin, J. (2020). The boundaries of pragmatism in Muslim education: Comparing the Islamic pedagogies of Sayyid Qutb and Fethullah Gülen. *Critical Research on Religion*, 8(3), 257–272. doi: 10.1177/2050303220952866
- Hanifah, U., Sujannah, I., Rohmawati, A. N. D., & Maisyanah, M. (2020). Implications of Formal and Non Formal Islamic Education Institutions in Indonesia on Children's Experience. *Journal of Islam and Science*, 7(1), 21–26. doi: 10.24252/jis.v7i1.14011
- Hernandez, A. A. (2020). Green IT Adoption Practices in Education Sector. In *Waste Management* (pp. 1379–1395). IGI Global. doi: 10.4018/978-1-7998-1210-4.ch063
- Huda, N. (2007). *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Idris, M., & Mokodenseho, S. (2021). Model Pendidikan Islam Progresif. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 72–86. doi: 10.18860/jpai.v7i2.11682
- Idris, M., Tahir, S. Z. bin, Yusuf, N., Willya, E., Mokodenseho, S., & Yusriadi, Y. (2021). The Implementation of Religious Moderation Values in Islamic Education and Character Subject at State Senior High School 9 Manado. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(6), 1–16.
- Kopnina, H. (2020). Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals. *The Journal of Environmental Education*, 51(4), 280–291. doi: 10.1080/00958964.2019.1710444
- Kosasih, A., Rizal, A. S., & Asyafah, A. (2020). Values' Education Model for Islamic Education Institutions in Indonesia: A Study of Al-Basyariyah Modern Islamic School. *Multicultural Education*, 6(1), 88–104. doi: 10.5281/zenodo.3827732
- Koskela, T., Pihlainen, K., Piispa-Hakala, S., Vornanen, R., & Hämäläinen, J. (2020). Parents' Views on Family Resiliency in Sustainable Remote Schooling during the COVID-19 Outbreak in Finland. *Sustainability*, 12(21), 8844. doi: 10.3390/su12218844
- Latief, S., Sari, Y. A., Yusuf, M., Armila, A., & Hidayat, R. E. (2021). The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4(2), 86–99. doi: 10.33648/IJOASER.V4I2.105
- Mahmud, A. A. H. (2000). *al-Tarbiyah al-Diniyyah al-Ghaibah*. Kairo: Dâr al-Tawzi wa al-Nashr.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1996). *Qualitative Data Analysis (II)*. Newbury Park, CA.: Sage Publication, Inc.
- Milligan, J. A. (2020). *Islamic Identity, Postcoloniality, and Educational Policy*. Singapore: Springer. doi: 10.1007/978-981-15-1228-5
- Mokodenseho, S. (2020). *Pendidikan dan Politik: Gerakan Sarekat Islam di Sulawesi Utara*

- Periode 1920-1950* (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57524>
- Mokodenseho, S., & Zamhari, A. (2021). The Struggle of Islam and Christianity in the Establishment of Educational Institutions in Bolaang Mongondow, North Sulawesi (1905-1942). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 22(1), 23–48. doi: 10.18860/ua.v22i1.11760
- Munadi, M., & Hakiman. (2021). Islamic Religious Education in The Archipelago: A Study of Doctoral Program Curriculum. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(5), 563–573. doi: 10.35741/issn.0258-2724.56.5.51
- Mushlihin, M., Narulita, S., & Aulia, R. N. (2021). Education and the formation of Islam Nusantara: Epistemology, Direction and Sustainability. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 261–270. doi: 10.21009/hayula.005.02.07
- Muslihah, E. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Diadit Media.
- Nasution, S. (2001). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, A. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurbaiti, N., Suparta, M., & Azwar, M. (2020). Islamic Education and Islamization Channels in Malay Peninsula in 7 th- 8th Centuries AD. *Buletin Al-Turas*, 26(2), 303–316.
- Rahman, M. (2021). Traditional Islamic Education Institutions in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 8838–8847. doi: 10.33258/BIRCI.V4I4.2857
- Ramayulis, R. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam; Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi Dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Raya, M. K. F. (2018). Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 228–242. doi: 10.38073/jpi.v8i2.202
- Ritonga, A. A. (2017). Pertumbuhan dan Perkembangan Institusi Pendidikan Awal di Indonesia: Pesantren, Surau dan Dayah. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–22. doi: 10.30829/TAZ.V6I1.147
- Rofi, S. (2016). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *Jurnal Tarbiya*, 1(1), 139–174.
- Sabirin, S., Yusuf, M., Abdullah, I., Mujiburrahman, M., & Prasojo, Z. H. (2022). The Cultural Survival of Traditional Islamic Education: Dayah Ulee Titi in Modern Aceh, Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02), 737–758. doi: 10.30868/EI.V10I02.1395
- Shiddiqi, N. (1996). *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silfiana, R. (2020). A Traditional and Modern Education System of Pondok Pesantren in Perspective Philosophy of Education. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 43. doi: 10.30595/islamadina.v0i0.6894
- Sirozi, M. (2004). Secular-religious debates on the Indonesian National Education System: colonial legacy and a search for national identity in education. *Intercultural Education*, 15(2), 123–137. doi: 10.1080/1467598042000224998
- Souto-Otero, M. (2021). Validation of non-formal and informal learning in formal education: Covert and overt. *European Journal of Education*, 56(3), 365–379. doi: 10.1111/ejed.12464
- Sukmurdianto, S., & Zulfa, M. Y. (2020). Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 143–164. Retrieved from <http://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/39>
- Suryanegara, A. M. (1999). *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*.

Bandung: Mizan.

Uka Tjandrasasmita. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Untung, S. (2013). Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Pesantren. *Forum Tarbiyah*, 11(1), 2–19.

Ziemek, M. (1986). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.

Zuhairini, Z. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zuhri, S. (2021). Regimented Islamophobia : Islam, State, and Governmentality in Indonesia. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 9(2), 387–422. doi: 10.21043/qijis.v9i2.8249